

MENCEGAH KORUPSI LEBIH BAIK DARIPADA MEMBERANTAS KORUPSI

MATHIUS TANDIONTONG

**DOSEN PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN
MARANATHA**

Kasus korupsi yang berkaitan dengan tersangka Muhammad Nazarudin tidak ada habis-habisnya. Penyelewengan dana proyek sejumlah Rp 8,9 miliar berkaitan dengan pengadaan tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi proyek baru KPK. Kasus tersebut menyeret nama baru yaitu Neneng Sri Wahyuni (istri Muhammad Nazarudin). Neneng sudah menjadi buronan KPK dalam kasus ini. Muhammad Nazarudin dan saudaranya Muhammad Nasir diminta KPK sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana proyek tenaga surya tersebut. Pengusutan kasus suap pembangunan wisma atlet sampai korupsi proyek pengadaan tenaga surya telah menjadi kompleks dan rumit. Nazarudin minta semua isu tentang dirinya dikonfrontasikan dengan sejumlah orang, antara lain Chandra M. Hamzah (wakil ketua KPK) dan Anas Urbaningrum (ketua partai nasional demokrat). Nazarudin minta dihadirkan ahli *lie detector*, Lukas Budi Santoso dan disaksikan media.

Carut marutnya sistem pengelolaan Negara kita menghiasi media massa setiap hari. Mau dibawa kemana arah perjalanan Negara Indonesia ini? Mau diarahkan kemana generasi muda bangsa Indonesia ini? Pertanyaan ini harus dijawab oleh segenap jajaran pimpinan Negara Indonesia sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai rakyat Negara Indonesia, kita pun dapat berkontribusi memberikan sumbangannya pemikiran kepada penyelesaian penyakit korupsi yang berjangkit di Negara tercinta ini. Kita harus menciptakan solusi untuk jangka panjang, dan bukan solusi hanya untuk menenangkan masyarakat saja. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah timbulnya masalah korupsi daripada menyelesaikan masalah akibat korupsi. Korupsi terjadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk bertindak dengan cara melanggar hukum yang ada. Jadi pada peristiwa ini, titik kritisnya terletak pada pengambilan keputusan kemudian melakukan tindakan. Berarti kita harus membuat seseorang mempertimbangkan dengan seksama sebelum keputusan tersebut dibuat.

Solusi yang saya tawarkan untuk masalah ini adalah membuat rerangka pengambilan keputusan yang etis yang diimplementasikan pada sistem. Rerangka pengambilan keputusan etis terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama, melakukan uji awal (preliminary test) dalam bentuk lima pertanyaan; tahap kedua, menghitung risiko dengan melakukan perhitungan kuantitatif menggunakan metoda *cost – benefit analysis*. Jadi rerangka pengambilan keputusan etis tersebut dilakukan untuk menguji keputusan

yang belum dibuat atau ketika seseorang mengalami dilema etis. Berikut ini merupakan contoh kasus korupsi neneng pada proyek pengadaan tenaga surya di kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

1. *Preliminary test*

- a. Akankah Neneng merasa nyaman ketika namanya muncul dikoran besok pagi sebagai tersangka kasus korupsi?
- b. Akankah Neneng bangga dengan keputusan atau tindakan melakukan korupsinya?
- c. Akahkah Ibunda Neneng merasa bangga atas keputusan atau tindakan Neneng melakukan korupsi?
- d. Apakah tindakan atau keputusan yang dibuat Neneng sesuai dengan peraturan hukum pemerintahan?
- e. Apakah tindakan atau keputusan yang dibuat Neneng dirasakan benar oleh Neneng sendiri?

2. Cost – Benefit Analysis

Pada tahap ini dibuat contoh simulasi perhitungan *cost – benefit analysis* untuk kasus korupsi Neneng:

	Melakukan korupsi			Tidak melakukan korupsi		
	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Total	Jangka Pendek	Jangka Panjang	Total
<i>Benefit:</i>						
a. Mendapat uang banyak dengan cepat b. Kenyamanan hidup keluarga yang sakinah	Rp. 5 miliar		Rp. 5 miliar		Rp 100 miliar	Rp 100 miliar
Total	Rp. 5 miliar		Rp. 5 miliar		Rp 100 miliar	Rp 100 miliar
<i>Cost:</i>						
a. Hidup sebagai buronan b. Hidup dengan uang secukupnya		(Rp 100 Milyar)	(Rp 100 Milyar)		(Rp 5 Milyar)	(Rp 5 Milyar)
Total			(Rp 100 Milyar)	(Rp 5 Milyar)		(Rp 5 Milyar)
<i>Net Benefit - Cost</i>			(Rp 95 Milyar)			Rp 95 Milyar